



Penulis :
Afrinia Lisdiyanti Permatasari S.Si., M.Sc.
Dosen Prodi Geografi
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Pertumbuhan pariwisata menjadi hal penting dalam pembangunan, industri pariwisata semakin meningkat pada dekade tahun terakhir ini. Hal ini juga terjadi dalam pengembangan wisata alam atau desa wisata. Desa wisata menjadi salah satu program pemerintah sebagai pembatalan dalam meningkatkan

Kesiapan Desa Wisata dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

kesejahteraan masyarakat (Savitri et al., 2019). Pengembangan desa wisata, erat kaitannya dengan analisis dalam pendekatan dalam bidang keilmuan geografi. Dimana melalui keterkaitan antara wilayah, ekologi, dan keruangan yang dimiliki dari suatu wilayah dapat digali dan dikaji dengan analisis geografi dan membantu dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dan berkesinambungan (Budiani et al., 2018).

Pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya virus tersebut masuk ke Indonesia. Sampai dengan saat ini, pandemi tersebut belum berakhir. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu di bidang pariwisata, tak terkecuali desa wisata. Menurut organisasi pariwisata dunia (UNWTO) terdapat sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor

pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak covid-19.

UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan internasional bisa menurun sebesar 1% hingga 3% pada tahun 2020 secara global. Untuk terus mendukung keberlangsungan roda perekonomian, kebijakan adaptasi kebiasaan baru diterapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan desa wisata. Masyarakat yang sudah mengalami kejenuhan selama pandemi, mulai bisa beraktivitas kembali. Tentunya hal tersebut harus memenuh protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu destinasi wisata, desa wisata wajib menerapkan hal untuk mencegah penularan virus Covid-19.



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menggariskan bahwa destinasi wisata unggulan yang dipersiapkan untuk menerima wisatawan kembali harus menerapkan prinsip HCS (Healthy, Clean and Safety).

Menurut World Travel & Tourism Council (WTTC) beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru adalah memperhatikan kesiapan operasional dan staf, memastikan pengalaman yang aman, membangun kembali kepercayaan wisatawan, dan kepercayaan diri serta penerapan kebijakan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Menurut Dinas Pariwisata

Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang wajib di patuhi oleh pengelola desa wisata, diantaranya yaitu wajib menyediakan thermogun dan sarana cuci tangan, petugas wajib memakai masker dan sarung tangan, petugas wajib mendata pengunjung (nama, alamat dan nomor telepon), terdapat batasan jam operasional, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, membuat laporan rutin ke Dinas Pariwisata, wisatawan wajib menggunakan masker dan menghindari kerumunan.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam dengan beberapa pengelola desa wisata di Kabupaten Sleman, secara keseluruhan belum semua desa wisata dapat mulai beroperasi kembali selama pandemi Covid-19. Kondisi sarana prasarana, kebijakan SOP dan pemanfaatan teknologi belum dioptimalkan oleh

pengelola desa wisata. Salah satu desa wisata yang sudah melakukan event kegiatan yaitu Desa Wisata Kampung Iklim Karangtanjung. Pada akhir tahun kemaren telah mengadakan event Ngayogjazz secara virtual. Hal tersebut tentunya dapat menjadi inspirasi bagi beberapa pengelola desa wisata lain untuk terus produktif selama pandemi Covid-19.

Selain itu, metode tour secara virtual juga dapat diterapkan di beberapa desa wisata. Tentunya hal tersebut harus didukung oleh berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah setempat. Kesiapan desa wisata selama pandemi Covid-19 merupakan hal yang cukup vital untuk terus mendukung perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)

Awal 2021, BNPB Catat 185 Bencana

JAKARTA (KR) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 185 bencana terjadi sejak 1 hingga 21 Januari 2021, yang didominasi bencana hidrometeorologi.

"Ada 127 kejadian banjir di beberapa wilayah Tanah Air, sedangkan tanah longsor 30 kejadian dan puting beliung 21. Kejadian bencana lain yang tercatat, yaitu gelombang pasang lima kejadian dan gempa bumi dua kejadian," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati di Jakarta, Kamis (21/1).

Dari sejumlah kejadian tersebut, kata Raditya Jati, meskipun banjir paling sering terjadi, hingga kini gempa bumi paling banyak mengakibatkan korban jiwa.

Terdapat korban meninggal akibat gempa bumi berjumlah 91 jiwa, tanah longsor 41 dan banjir 34, sedangkan hilang banjir delapan dan gempa tiga orang.

Demikian juga korban luka, gempa bumi masih paling tinggi jumlah korbanannya. BNPB mencatat korban luka-luka akibat gempa bumi 1.172 jiwa, tanah longsor 26, puting beliung tujuh, dan banjir lima orang.

Total kerusakan rumah berjumlah 1.896 unit dengan tingkat yang berbeda. BNPB mencatat rumah rusak berat 147

unit, rusak sedang 63 dan rusak ringan 1.686. Dari rumah rusak, jumlah kerusakan akibat gempa bumi, khususnya yang terjadi di Sulawesi Barat, masih dalam proses pendataan di lapangan.

Dari kategori rusak berat, tanah longsor masih menyebabkan kerusakan paling tinggi, yaitu 45 unit, disusul gelombang pasang atau abrasi 40, banjir 38 dan puting beliung 24.

Bencana juga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik. Dari sejumlah kejadian bencana, kerusakan pada fasilitas penduduk berjumlah 18 unit, rumah ibadah 15, kesehatan 3, kantor 2, dan jembatan 25. Kerusakan fasilitas publik akibat gempa masih dalam pendataan. (Ati)-f

PEMKAB KULONPROGO-PT AP I Bangun Pasar Rakyat di Atas 'Underpass' BIY

KULONPROGO (KR) - Penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura (AP) I menjadi pintu masuk bagi Pemkab Kulonprogo untuk melaksanakan kerja sama saling menguntungkan dalam memanfaatkan keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta/ Yogyakarta International Airport (BIY/YIA), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saya harap betul-betul bisa memanfaatkan peluang kerja sama dengan PT Angkasa Pura I, sehingga memberi peluang kepada masyarakat untuk berjualan, agar publik bisa masuk ke BIY/YIA sebanyak-banyaknya, sekadar berbelanja atau wisata dan juga ada pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) melalui parkir," kata Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo pada penandatanganan MoU kerja sama saling menguntungkan dengan PT AP I selaku pengelola BIY/YIA, disaksikan Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE dan Wabup Fajar Gegana di Ruang Sermo Kompleks Pemkab, Kamis (21/1).

Salah satu kerja sama itu pemanfaatan lahan di atas underpass bandara akan dibangun pasar rakyat. Karena bukan area steril maka pasar rakyat tersebut rencananya akan didayagunakan untuk penjualan produk, kuliner atau lainnya.

Saat ini masih dalam pembahasan pemkab dan PTAP I.

"Semakin cepat realisasi pemanfaatan lahan di atas underpass semakin baik. Tapi sekarang masih dalam pembahasan. Nanti Dinas Perdagangan yang kita tugasi menanganinya," ujar Sutedjo seraya menambahkan, di BIY saat ini juga sudah ada Tomira yang merupakan kerja sama BIY dengan Dinas Koperasi.

Diungkapkan, kesepakatan yang ditandatangani berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan. Karenanya para Kepala OPD diminta membuat perencanaan kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan PT AP I dengan dukungan APBD.

PTS General Manager (GM) BIY/YIA Taohid Purnomo Hadi mengatakan, MoU ini untuk mensinergikan potensi sumber daya dalam mengembangkan potensi daerah Kulonprogo. Selain itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui konektivitas yang difokuskan pada perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah (UKM), pariwisata, kebudayaan dan teknologi informasi. "Kami berharap OPD bisa berperan aktif memanfaatkan kerja sama dalam satu tahun ini, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ujarnya. (Rul)-d

Pembatasan

"Melihat hasil monitoring harian, evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, maka Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama 2 minggu berikutnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Untuk mendukung perpanjangan PPKM, Gubernur diminta melakukan evaluasi berdasarkan empat parameter yang telah ditetapkan terhadap seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.

"Yang akan digunakan sebagai dasar penetapan kabupaten/kota yang akan memberlakukan pembatasan kegiatan di periode 2 minggu berikutnya," terangnya.

Tidak tertutup kemungkinan, pemberlakuan pembatasan kegiatan ini akan diberlakukan lebih luas dengan penambahan kabupaten/kota yang baru.

"Dari peta zonasi risiko kenaikan kasus Covid-19 yang dipantau di 73 kabupaten/kota, masih terdapat 29 kabupaten/kota dengan Zona Risiko Tinggi. 41 kabupaten/kota dengan Zona Risiko Sedang dan 3 kabupaten/kota dengan Zona Risiko Rendah," bebernya.

Pembatasan kegiatan dimaksud meliputi: 1) Perkantoran WFH 75% 2) Belajar-mengajar secara daring 3) Sektor

Sambungan hal 1

Esensial beroperasi 100% 4) Pusat belanja/mall beroperasi sampai pukul 20.00 5) Restoran: dine-in 25%, take-away diizinkan 6) Kegiatan Konstruksi 100% beroperasi 7) Kegiatan ibadah 50% 8) Fasilitas Umum ditutup, kegiatan sosial budaya dihentikan sementara 9) Transportasi umum diatur kapasitas dan jam operasional.

"Semua pembatasan tersebut harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," tegasnya.

Sedangkan untuk DIY, terus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Meski kasusnya sempat mengalami penurunan, tapi belum seperti yang diharapkan. Untuk itu masyarakat tidak hanya menjadi objek sebuah kebijakan. Tetapi harus menjadi subjek, dengan harapan mereka dapat saling mengingatkan.

"Kalau pemerintah pusat memperpanjang tidak ada pilihan lain, DIY juga memperpanjang. Kecuali kalau kita punya keyakinan kasusnya turun menjadi 50 atau 100 kasus. Tapi kalau kasusnya masih lebih dari 200 tidak berani," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (21/1).

Menurut Sultan, penyebaran Covid-19 di

DIY saat ini kebanyakan melalui keluarga dan tetangga. Untuk itu jika interaksi antar warga tidak diputus, maka kasus positif Covid-19 sulit untuk ditekan. Selain itu, apabila pembatasan kegiatan masyarakat itu diperpanjang, Sultan mengharapkan desa bisa aktif dalam mengawasi mobilitas masyarakat. Pengawasan di desa dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Saat awal-awal kasus Covid-19 kita mencoba memutus mata rantai di level RT/RW sama desa. Bahkan saat saya keliling diberlakukan tempat jalan masuk ditutup bambu. Tapi saat ini ketika ada sedikit kebebasan, saat saya keliling hanya ada tulisan saja. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, saya berharap peran RT/RW dan desa sangat penting," terang Sultan.

Sultan mengungkapkan, langkah (strategi) yang diterapkan Pemda DIY saat ini sedang diadopsi oleh pemerintah pusat. Langkah tersebut diterapkan di beberapa provinsi di Jawa dan Bali yang bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19. "Harapan saya kita (DIY) bisa memberi contoh dan kasusnya (angka penularan Covid-19) bisa turun," ujar Sultan. (Ati/Ria/Ira)-f

Tertinggi

"Tren penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mengalami penurunan pada minggu kemarin dibandingkan minggu sebelumnya. Jika kasus Covid-19 hari ini meningkat tajam kembali, berarti memang kita semua belum optimal untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes)," ujar Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih.

Berty mengatakan, tambahan kenaikan kasus tersebut mayoritas 259 kasus dari tracing kontak kasus positif, 126 perkara mandiri, 68 belum ada informasi riwayat, dua skrining karyawan kesehatan dan satu perjalanan luar daerah.

"Kasus baru tersebut sebagian besar berdomisili di Kabupaten Bantul 182 orang, Sleman 179, Kota Yogya 61, Kulonprogo 20 dan Gunungkidul 14 orang," paparnya.

Sedangkan pasien sembuh, menurut Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini, bertambah 206 orang menjadi 12.053. Tambahan pasien sembuh ini terbanyak berdomisili di Bantul 133 orang, Gunungkidul 43, Sleman 26, Kota Yogya tiga dan Kulonprogo satu orang. "Untuk kasus meninggal bertambah

sembilan kasus menjadi 417 kasus," katanya.

Di Kabupaten Kulonprogo, kasus harian Covid-19 juga mencapai rekor penambahan tertinggi 73 kasus. "Kamis ada penambahan 73 kasus, kesembuhan satu orang, selesai isolasi sembilan orang, satu kasus meninggal konfirmasi positif dan satu lagi meninggal probabel. Total kasus Covid-19 sepanjang Januari 2021 (hingga tanggal 21) 699 orang. Lebih tinggi dari Desember 2020 yang tercatat 536 kasus," ungkap Banning Rahayujati, Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo.

Dikatakan Banning, Januari ini penambahan kasus harian jauh lebih tinggi dari sebelumnya, yang di kisaran 35 kasus. Tiap minggu polanya fluktuatif, tetapi rata-rata 35 kasus baru. "Dari total 616 kasus sepanjang Januari 2021 (sampai tanggal 20), 74 persen penderita usia produktif. Disusul anak di bawah 18 tahun 12 persen, dan lansia 15 persen. Sebagian besar penderita tertular dari kasus sebelumnya di Kulonprogo," ujarnya.

Kasus 2021 ini sebanyak 54 persen adalah kontak erat kasus di Kulonprogo baik di keluarga ataupun kantor. Diketahui

positif dari ikut tes mandiri 11 persen dan kurang lebih 25 persen masih dalam penelusuran atau belum diketahui penyebabnya.

Banning menandakan, lonjakan kasus ini tidak lepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes). Banyak warga yang hanya menjalankan prokes saat di luar rumah, sementara di dalam rumah tidak dipatuhi. Padahal prokes harus tetap dijalankan tanpa melihat lokasi.

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta Irene menyatakan, kendati jumlah kasus harian di DIY dalam beberapa waktu terakhir cukup tinggi, namun layanan di laboratorium tetap bisa dilakukan dengan baik dan relatif tidak ada kendala. Begitu pula para petugas, bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.

"Selain berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, kesehatan para petugas tetap menjadi perhatian. Kami selalu minta untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta berhati-hati dalam bekerja," ungkap Irene. (Ria/Ira/Wid)-d

Salah

Maka pembukaan lahan di hulu untuk sawit dan tambang diobral. Sedang di hilir, alih fungsi lahan untuk properti lebih dipermudah. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) mudah disesuaikan. Di UU CK (Omnibus-law) cukup Peraturan Kepala Daerah. Tak perlu lagi Peraturan Daerah yang perlu persetujuan DPRD. Keuntungan sudah terpolakan sebelum calon mereka dilantik.

Banjir lokal bisa jadi karena orang buang sampah sembarangan. Namun banjir kolosal bisa jadi karena izin investasi ugulgalan. Memang meski hutan digunduli, kalau tak hujan, ya tak banjir. Betul. Ibaratnya, rumah kita, meski pintunya 24

jam dibuka lebar-lebar, kalau tak ada pencuri, ya tak ada yang akan hilang! Tapi tentu kalau kita masih waras, kita akan berkhawatir. Mempersiapkan pintu yang baik, pada saatnya dikunci, sambil berdoa, semoga tak ada pencuri.

Mengapa kita tidak maksimal berkhawatir membuat rencana investasi yang tahan bencana? Berapa PDB yang naik oleh investasi itu? Dan berapa yang musnah seketika begitu ekonomi lumpuh karena bencana kolosal? Lalu dengan mudahkah kita salahkan hujan kita banjir melanda? Allah tak pernah salah dalam menurunkan rizkinya berupa hujan. Untuk menguji kita

siapa yang lebih baik amalnya (QS Al-Mulk:2). Namun kita sering terlalu malas memikirkan tanda-tanda kekuasaanNya, berupa sunnatullah alam ini. Dan kita terus saja santai mengabaikan peringatan-peringatan kecil, seolah urusan dunia kita ini tak ada hubungannya dengan Tuhan. Padahal Tuhan bukan hanya tempat menengis dan berdoa saat semua sudah terlambat! Ibu awan juga tak pernah menangis. Karena yakin, anak-anaknya yang jatuh menjadi hujan pasti akan kembali.

(Penulis adalah pakar Geospasial, Anggota Dewan Penasehat Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE))-f

Asap

atau Siaga dengan potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi Sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebeg, dan Putih sejauh maksimal 5 kilometer. Sedangkan apabila terjadi letusan eksplosif, lontaran material vulkanik dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman meningkatkan kewaspadaan terhadap aliran-aliran sungai berhulu Gunung Merapi di lereng sisi Barat menyusul adanya perubahan arah guguran lava pijar dan awan panas yang dominan ke Barat.

"Kami tetap mewaspada potensi ancaman bahaya Gunung Merapi di sisi Barat, terutama di aliran sungai karena memang selama ini arah gugurannya dominan ke Barat," kata Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Sleman Joko Lelono.

Menurut dia, potensi ancaman bahaya tersebut selain guguran lava pijar dan awan panas juga potensi banjir lahar di aliran sungai berhulu Merapi. "Dengan meningkatnya guguran ke Barat, maka tentunya timbunan material vulkanik Merapi di puncak juga bertambah. Ini berpotensi terjadi banjir lahar di sungai berhulu Merapi saat turun hujan deras di puncak," katanya. (Dev)-f

Sri Purnomo

kekebalan saya belum sepenuhnya terbentuk," ujar Sri Purnomo kepada KR, Rabu (21/1). Penjelasan tersebut sebagai upaya meluruskan informasi kesehatannya, yang berkembang menjadi informasi yang simpang siur di media sosial. (Berita terkait, di halaman 5)

"Yang saya alami ini bukan termasuk KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi," ujarnya.

Menurutnya, kedisiplinan memakai masker sangat penting. Termasuk mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena meskipun saya sudah divaksin, tidak berarti kebal 100%. Tidak ada vaksin atau obat yang mengobati 100%. "Mari kita teruskan target vaksinasi sampai 70% masyarakat Indonesia. Dan kita tetap berjuang dengan berdisiplin protokol kesehatan agar pandemi ini berkurang," ujarnya. (Jon)-d

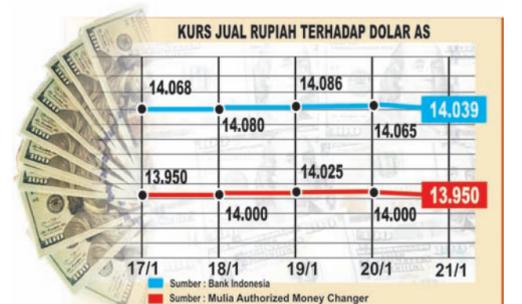
54 Korban

Uji swab PCR dinilai penting, sebab sebagian pengungsi berniat tinggal sementara di rumah kerabat yang berada di kawasan Jawa Tengah. "Setelah hasil uji swab diketahui dengan hasil negatif, pengungsi boleh meninggalkan pengungsian di STP. Tetapi mereka harus membuat surat pernyataan, sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi sesuatu dapat dilakukan pelacakan," jelas Walikota sembari menyebut, sebaliknya jika hasil swab dinyatakan positif, yang bersangkutan diisolasi di tempat terpisah.

Ketika menerima pengungsi, Walikota sempat membuka sesi tanya-jawab untuk mengetahui kebutuhan mereka. Saat tanya jawab itu diketahui, sebagian pengungsi membutuhkan pakaian, sebab kondisi rumah mereka hancur sehingga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Seketika itu juga Walikota mengontak koleganya untuk mengiriskan baju, mini-muni agar dapat dimanfaatkan pengungsi berganti pakaian dalam satu dua hari ke depan.

Menurut Rudyatmo, pada prinsipnya Solo siap me-

nampung pengungsi gempa Mamuju dalam jumlah lebih banyak, jika memang diperlukan. Masih ada beberapa lokasi selain STP yang dapat digunakan untuk menampung pengungsi. Di antaranya, Dalem Joyokusuman dan Graha Wisata Niaga. "Untuk anak-anak bangsa, apalagi saat ini sedang menderita, Solo siap menampung serta menjamin hidup kesehariannya hingga dampak bencana ini berlalu," tegasnya. (Hut)-d



Prakiraan Cuaca					Jumat, 22 Januari 2021	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95